

**GERAKAN PENDIDIKAN
ELIT INTELEKTUAL
DAN NASIONALISME
(1900 – 1942)**

Mumuh Muhsin Z.

**YMSI JABAR PRESS
BANDUNG
2010**

**Gerakan Pendidikan, Elit Intelektual, dan Nasionalisme (1900 –
1942) Mumuh Muhsin Z.**

Hak cipta dilindungi undang-undang
all rights reserved

Diterbitkan oleh YMSI Jabar
Jl. Tenteram 23 Telepon 022-2034641
Bandung

Cetakan pertama, Desember 2010

Editor: Dr. Dade Mahzuni, M.Si.
Layout: Miftahul Falah, M.Hum.
Design sampul: Yulianti, S.Kom.

Perpustakaan Nasional: Katalog dalam Terbitan KDT)

Muhsin Z., Mumuh. 2013
Gerakan Pendidikan dan Nasionalisme (1900 – 1942). Cetakan
pertama. Bandung: YMSI.
190 + vii halaman; 15,5 x 23 cm.

Indeks

ISBN: 978-602-98118-2-7

I. Pendidikan, Elit Intelektual,
Nasionalisme, Sejarah

1. Muhsin Z., Mumuh
959.821

KATAPENGANTAR

Prof. Kuntowijoyo pernah menyayangkan karya-karya ilmiah sejarah dan hasil penelitian para sejarawan hanya terumpuk di rak-rak perpustakaan. Skripsi, tesis, disertasi sejarah, dan hasil penelitian lainnya tidak bisa dikonsumsi masyarakat umum. Padahal, semua itu memiliki standar kualifikasi tertentu, tema yang sangat beragam, lingkup spasial yang cukup tersebar, dan kualifikasi-kualifikasi lainnya.¹ Kekhawatiran senada dilontarkan juga oleh Prof. Susanto Zuhdi.² Tentu saja, terjadinya kondisi seperti itu bukan tanpa sebab; alias ada banyak penjelasannya, meskipun alasan-alasan termaksud tidak akan diuraikan di sini.

Terpicu oleh keprihatinan dua guru besar ilmu sejarah tersebut, penulis berkeputusan untuk mempublikasikan karya ilmiah yang pernah dibuat tahun 1986 agar bisa dikonsumsi masyarakat umum. Pertimbangannya adalah tema yang dikaji dianggap masih cukup aktual dan akan terasa selalu aktual untuk jadi perhatian publik. Tulisan ini memuat dua hal. Pertama adalah pendidikan, kedua mengenai nasionalisme. Keduanya ditinjau dari perspektif sejarah.

Sering muncul diskusi mengenai asumsi mengendurnya semangat nasionalisme pada generasi muda. Tentu saja

¹Kuntowijoyo. 2003. *Metodologi Sejarah*. Cetakan kedua. Yogyakarta: Tiara Wacana, hlm. 4.

²Susanto Zuhdi. 2008. "Metodologi Strukturistik dalam Historiografi Indonesia; sebuah Telaah Alternatif", dalam Djoko Marihandono (Penyunting). *Titik Balik Historiografi di Indonesia*. Jakarta: Wedatama Widya Sastra bekerja sama dengan Departemen Sejarah FIB UI.

asumsi tersebut berdasar pada sejumlah indikator. Pada sisi lain, dunia pendidikan sekarang ini pun diasumsikan kehilangan orientasi yang nyata, *out put* macam apa sebenarnya yang hendak dihasilkan. Dunia pendidikan sekarang sudah kehilangan idealismenya, karena yang tampaknya ke permukaan adalah orientasi yang mencerminkan semangat materialistik, baik bagi peserta didik maupun bagi lembaga-lembaga penyelenggara pendidikan. Karya tulis yang terpublikasi ini diharapkan jadi bahan kontemplasi semua pihak sehingga berbuah reflektif untuk merencanakan dunia pendidikan di masa depan, bagi kejayaan bangsa dan negara.

Semula tulisan ini berbentuk skripsi yang diberi judul cukup panjang, *Peranan Gerakan Pendidikan dalam Membangkitkan Kesadaran Nasional (1900 – 1942); Studi tentang Peranan Elit Intelektual di Jawa dalam Perjuangannya Membangkitkan Kesadaran Nasional melalui Gerakan Pendidikan*. Akan tetapi ketika menjadi buku judulnya diubah, lebih disederhanakan menjadi berjudul *Gerakan Pendidikan, Elit Intelektual, dan Nasionalisme*. Isinya tidak banyak mengalami perubahan; demikian juga teknis penulisannya dipertahankan. Sistem penunjukan sumber yang masih *footnote* (dengan segala *tetek-bengek* peristilahan yang sering membingungkan seperti *ibid*, *op. cit.*, dan *loc. cit*) tetap dipertahankan. Sedikit perubahan hanya dilakukan berkait dengan redaksional saja, untuk menghasilkan kalimat-kalimat yang lebih efektif. Maksud mempertahankan isi dan teknis penulisan adalah supaya tulisan ini selain bermanfaat secara substantif juga menjadi dokumentasi ilmiah; dan khusus bagi penulis sendiri, karya ini menjadi rekaman perjalanan intelektualitas penulis.

Kalau boleh sedikit nar-sis, penulis cukup memiliki kebanggaan dengan masa lalu intelektualitas penulis. Di tengah suasana yang masih menggunkana mesin tik, ketika internet belum dikenal, sarana transportasi dan komunikasi yang masih terbatas, ditambah dengan kondisi perekonomian yang kurang leluasa, sudah muncul semangat heuristik yang menggebu.

Semoga saja tulisan ini bermanfaat bagi khalayak pembaca. Penulis beryakinan bahwa pembaca akan lebih cerdas dalam mengambil manfaat dari tulisan ini ketimbang yang dimaksud oleh penulis sendiri.

Bandung, Desember 2010

DAFTAR ISI

	Hlm.
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Hipotesis	6
1.3 Organisasi Penulisan	6
BAB II LATAR BELAKANG KELAHIRAN	
ORGANISASI SOSIAL PENDIDIKAN	9
2.1 Politik Etis sebagai Landasan Kebijakan	
Politik Pendidikan Belanda	9
2.1.1 Politik Kolonial Konservatif	
(1830 -1870)	12
2.1.2 Politik Kolonial Liberal	
(1870-1901)	18
2.1.3 Politik Etis (1901)	24
2.2 Pelaksanaan Pendidikan Pemerintah	
Kolonial Belanda	30
BAB III PENDIDIKAN SEBAGAI MEDIA	
PEMBANGKITKESADARAN NASIONAL	51
3.1 Lahirnya Nasionalisme Indonesia	51
3.2 Perintis Kebangkitan Gerakan Sosial	
Pendidikan	64
3.2.1 Sekolah-sekolah yang Berhaluan	
Agama	68
3.2.1.1 Muhammadiyah	70
3.2.1.2 Nahdlatul Ulama (NU)	86
3.2.2 Sekolah yang Berhaluan	

Kebudayaan.....	99
3.2.2.1 Taman Siswa	99
3.2.2.2 Bale Pawulangan Pasundan	112
3.2.3 Sekolah yang Berhaluan Politik	118
3.2.3.1 Ksatrian Instituut	118
3.2.3.2 Sekolah Sarekat Islam	124
3.3 Perjuangan Organisasi Sosial-Paedagogis	
Menuju Indonesia Merdeka	127
SIMPULAN	131
DAFTAR SUMBER	135

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Suatu hal yang tidak bisa dipungkiri bahwa datangnya kolonialisme Belanda telah membawa rakyat jajahannya ke arah modernisasi. Proses modernisasi ini didorong kuat oleh berbagai sistem yang diterapkannya, seperti komersialisasi hasil-hasil pertanian, transportasi dan komunikasi baru yang menyertainya, birokratisasi, serta pendidikan. Sebagai konsekuensinya, hal tersebut telah menimbulkan berbagai pergolakan dan membawa perubahan terhadap sistem masyarakat jajahan yang masih tradisional, termasuk struktur masyarakatnya.

Dalam masyarakat tradisional, mobilitas sosial secara vertikal, dalam hal ini yang naik (*social-climbing*), berjalan dengan sangat lambat sehingga keinginan untuk meningkatkan stratifikasi sosial haruslah terlebih dahulu menjalani proses yang sulit dan panjang. Sebagai misal, seseorang yang ingin mendapat kedudukan dalam jenjang birokrasi biasanya harus menempuh dua tahap. Pertama adalah *nyuwita* (mengabdikan) dan yang berikutnya *magang*³. Kedua tahapan ini mesti dilalui dengan menghabiskan waktu berbelas-belas tahun atau bahkan berpuluh-puluh

³Soemarsaid Moertono. 1985. *Negara dan Usaha Bina Negara di Jawa Masa Lampau: Studi tentang Masa Mataram II Abad XVI sampai XIX (Terjemahan Yayasan Obor Indonesia)*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, hlm. 111.

tahun.⁴ Di samping itu, status sosial yang dimiliki seseorang sangat tergantung pada hubungan kekerabatan, pemberian kuasa tradisional, atau kecakapan dan menunjukkan kesetiaan kepada kepentingan-kepentingan penguasa.⁵ Dengan demikian dapat dikatakan bahwa status sosial seseorang lebih banyak didapat karena "warisan" daripada karena "usaha".

Keadaan demikian segera berubah, terutama setelah dikenalkannya sistem pendidikan Barat. Animo masyarakat untuk memasuki sekolah pemerintah semakin meningkat. Hal tersebut terjadi karena sistem birokrasi pemerintah kolonial hanya bisa dimasuki oleh mereka yang memiliki kualifikasi lulusan sekolah. Ini berarti terbukanya mobilitas sosial vertikal yang naik, sehingga mereka (lulusan sekolah) mampu memasuki orbit sistem birokrasi pemerintahan kolonial. Dengan demikian, berarti pula bahwa semakin banyak muncul kelompok elit baru dalam masyarakat sebagai konsekuensi logis dari sistem pendidikan itu.

Munculnya elit baru yang lebih berorientasi ke masa depan dan mendorong pembaharuan yang progresif, lebih banyak dianggap sebagai saingan oleh elit tradisional yang cenderung berorientasi ke masa lampau dan mempertahankan *status quo*. Dalam perkembangan selanjutnya, ternyata bahwa kelompok elit baru ini, yang terdiri dari golongan intelektual, lebih banyak memainkan peranan

⁴ Heather Sutherland. 1983. *Terbentuknya sebuah Elite Birokrasi* (Terjemahan Sunarto). Jakarta: Sinar Harapan, hlm. 50.

⁵ Sartono Kartodirdjo. 1969. "Struktur Sosial dari Masyarakat Tradisional dan Kolonial", *Lembaran Sedjarah*, No. 4, Desember. Jogjakarta: Seksi Penelitian Djurusan Sedjarah Fakultas Sastra dan Kebudayaan Universitas Gadjah Mada, hlm. 32-33.

penting dalam memotori pergerakan nasional menentang penjajahan.

Lapangan pendidikan semakin mendapat perhatian dari pemerintah, terutama setelah diterapkannya Politik Etis (1901). Namun, di luar perhitungan pemerintah, pendidikan yang semula dimaksudkan sebagai alat untuk membentuk manusia-manusia yang *westernminded*, punya loyalitas yang besar terhadap pemerintah, dan memelihara serta memperkuat eksistensi pemerintah kolonial, terbukti berlainan dengan kenyataan. C. Snouck Hurgronje yang mengarsiteki politik asosiasi melalui kebijakan-kebijakan di bidang pendidikan mengalami kegagalan. Mereka yang mendapat pendidikan Barat ternyata semakin terbuka matanya untuk melihat eksistensi dirinya, bangsanya, dan tanah airnya sehingga tumbuhlah kesadaran mereka untuk memperbaiki nasibnya dan berusaha untuk melepaskan diri dari belenggu penjajahan.

Upaya mereka untuk bisa hidup mandiri, mengatur dan menentukan nasib bangsanya sendiri tanpa interferensi dari pihak luar diejawantahkan dalam berbagai bentuk pergerakan dengan beraneka orientasi, seperti orientasi etnis, budaya, agama, ideologi, dan bangsa. Pergerakan ini diinstitusikan dalam bentuk organisasi yang lebih teratur.

Dalam tahap pertama perkembangannya, organisasi-organisasi tersebut lebih banyak bergerak dalam lapangan politik. Akan tetapi selanjutnya, terutama setelah banyak pemimpin pergerakan ditangkap, dipenjarakan, atau bahkan dibuang, maka pergerakan dalam lapangan pendidikan dijadikan sebagai alternatif.

Pengambilan lapangan pendidikan sebagai alternatif didasarkan pada kenyataan bahwa betapa perlunya men-

didik generasi muda sebagai kader bangsa untuk menyiapkan dirinya dalam menghadapi, merebut, dan mengisi kemerdekaan kelak. Di samping itu didasarkan pula pada kenyataan tentang kekurangan serta aspek-aspek negatif dari sistem pendidikan yang dikelola oleh pemerintah.

Golongan intelektual, sebagai kelompok elit baru dalam masyarakat merupakan motivator dan dinamisator yang telah mampu menggiring massa ke arah terciptanya kesadaran nasional. Peranan kelompok elit intelektual dalam menyiapkan bangsanya menuju kemerdekaan ini sudah merupakan fenomena historis di negara-negara Timur termasuk Indonesia, yang kemerdekaannya diperoleh dalam kurun Perang Dunia II.⁶

Masalah tersebut di atas menarik untuk dibicarakan mengingat pentingnya peranan golongan intelektual sebagai kelompok elit baru dalam masyarakat yang berusaha membangkitkan kesadaran nasional hingga terciptanya kemerdekaan. Tidak hanya sampai di situ, tetapi peranan mereka dilanjutkan dalam mengisi dan mempertahankan kemerdekaan itu. Setelah kemerdekaan tercapai, golongan ini pula yang menjadi elit penguasa, atau *establishment* baru.

Pembahasan masalah ini pun memberikan gambaran tentang betapa pentingnya peranan pendidikan dalam membentuk watak anak didiknya sesuai dengan arah yang ingin dituju oleh pemimpin-pemimpin lembaga pendidikan tersebut. Beragamnya haluan pendidikan yang dikelola oleh

⁶Lihat Haryy J. Benda. 1981. "Kaum Intelegensia Timur sebagai Golongan Elit Politik", dalam Sartono Kartodirdjo (penyunting). *Elite dalam Perspektif Seiarahlm*. Jakarta: LP3ES, hlm. 154-176.

pihak partikelir akan memberikan kejelasan pula tentang munculnya pola pikir yang beragam dari lulusan-lulusannya dalam memandang dan merumuskan bentuk negaranya kelak. Pada akhirnya dapat dikatakan bahwa membahas masalah ini akan tetap memiliki relevansi untuk memahami segala problematika yang terjadi pada periode pasca-kemerdekaan.

Tulisan ini dibatasi pada objek penelitian di Jawa meliputi periode 1900 – 1942. Selain itu, lembaga pendidikan yang dimunculkan dan diuraikan di sini dibatasi pula. Pembatasan ini didasarkan pada jenis haluan pendidikan. Dari masing-masing haluan diambil dua sampel yang menurut anggapan penulis cukup representatif. Pendidikan yang berhaluan agama diwakili oleh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama; pendidikan yang berhaluan kebudayaan diwakili oleh Taman Siswa dan Bale Pawulangan Pasundan, dan pendidikan yang berhaluan politik diwakili oleh Ksatrian Instituut dan Sekolah Sarekat Islam.

Perlu juga dikemukakan, bahwa dalam tulisan ini tidak disebutkan secara terperinci mengenai para lulusan dari lembaga-lembaga pendidikan tersebut. Penulis hanya menyebutkan proses terbentuknya dan perkembangannya dengan sedikit menonjolkan tokoh pendirinya. Penulis berkeyakinan bahwa dengan berpikir secara logis kita bisa mendapatkan gambaran tentang betapa besarnya kontribusi mereka yang *notabene* kelompok intelektual dalam memainkan peranannya membangkitkan kesadaran nasional.

1.2 Hipotesis

Tulisan ini didasarkan pada hipotesis sebagai berikut.

1. Kebijakan pemerintah kolonial Belanda dalam bidang pendidikan memiliki tujuan ekonomis dan politis, yang kesemuanya demi kepentingan penjajahan dan dijadikan alat untuk memperkuat eksistensinya.
2. Sistem pendidikan yang dikelola pemerintah didasarkan pada kondisi objektif masyarakat jajahan, sehingga terciptalah polarisasi pendidikan.
3. Karena pemerintah kolonial Belanda menjadikan pendidikan sebagai alat penjajahan, maka bentuk perlawanan melalui media pendidikan dianggap sebagai suatu hal yang tepat.
4. Pendidikan, yang mampu melahirkan kelompok intelektual, merupakan alat perjuangan menuju Indonesia merdeka.

1.3 Organisasi Penulisan

Tulisan ini dimulai dengan bab I sebagai bab Pendahuluan yang secara singkat memaparkan problematika yang akan dibahas. Dalam bab II, penulis mencoba menguraikan tentang Latar Belakang Kelahiran Organisasi Sosial Pendidikan. Pembahasan dalam bab ini diawali dengan sebuah uraian mengenai Politik Etis sebagai Landasan Kebijakan Politik Pendidikan Belanda. Untuk memperoleh kejelasan tentang lahirnya Politik Etis, penulis terlebih dahulu memunculkan uraian tentang Politik Kolonial Konservatif dan Politik Kolonial Liberal sebagai latar belakang. Politik Etis meskipun *de*

facto merupakan eksploitasi yang lebih hebat dengan rumusan kata-kata yang manis, namun telah berhasil meniupkan suatu perubahan, bahkan akselerasi perubahan. Perubahan-perubahan yang lebih besar ini dimungkinkan setelah diperkenalkannya sistem pendidikan secara Barat.

Selanjutnya dalam bab III dibicarakan tentang lembaga-lembaga pendidikan swasta sebagai reaksi terhadap sistem pendidikan yang dikelola pemerintah. Lebih dari sekedar reaksi, lapangan pendidikan ini dijadikan media perjuangan untuk membangkitkan kesadaran nasional. Dalam bab ini dibahas pula latar belakang berdirinya, perkembangan, serta pendiri lembaga-lembaga pendidikan swasta secara relatif luas. Lembaga-lembaga pendidikan yang dibahas di sini adalah Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Taman Siswa, Bale Pawulangan Pasundan, Ksatrian Instituut dan Sekolah Sarekat Islam. Pembahasan bab ini diakhiri dengan sebuah uraian tentang Perjuangan Organisasi Sosial Paedagogis menuju Indonesia merdeka. Dengan berpegang pada isi uraian yang dikemukakan dalam bab-bab terdahulu, tulisan ini diakhiri dengan simpulan.